



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS HARYOTO PURNOMO**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
3. NHK : **108534**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.797.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 708.000.000
2. Tanah Seluas 237 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/60 m2 di MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 291 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 914.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
8. Tanah Seluas 304 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/386 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.746.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/180 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 414.000.000
11. Tanah Seluas 280 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000



12. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/500 m² di SLEMAN, WARISAN Rp. 300.000.000
13. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/140 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 373.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5 V AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.269.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.529.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.529.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.